

Memikirkan Kembali Arti *Million Friends Zero Enemy* dalam Era *Paradox of Plenty*

Ziyad Falahi

Indonesia for Global Justice, Jakarta

ABSTRACT

*Artikel ini berupaya menggambarkan bagaimana sejuta teman nol musuh menjawab tantangan hari ini, “mengarungi samudera bergejolak”. Ketika dunia menjadi saling ketergantungan, maka kerjasama menjadi faktor utama untuk selamat dari turbulensi. Oleh karena itulah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimis dengan kebijakan luar negeri ke segala arah, Indonesia akan dengan aktif mencari ikatan yang erat dengan negara di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, tanpa arah yang pasti, Indonesia terancam kehilangan jatidiri. Bahkan interdependensi tersebut mendorong Indonesia untuk melawan independensinya sendiri. Terlebih, dalam era *Paradox of Plenty* ketika informasi menjadi tidak terkendali, maka pemerintah di Indonesia harus siap menghadapi serangkaian kontroversi.*

Kata-Kata Kunci: *sejuta teman tanpa musuh, kebijakan luar negeri, jatidiri, interdependensi, dan paradox of plenty.*

This article try to describe how million friends zero enemy address today’s challenge, “navigating a turbulent ocean”. When the world became more interdependence, cooperation became a main factor to survive from the turbulences. Therefore, President Susilo Bambang Yudhoyono optimistic by all direction foreign policy, Indonesia will actively seek to raise to a higher level existing ties with countries in all corners of the globe. But, without a certain direction, Indonesia threatened lost of identity. Even the interdependence push Indonesia to againts his own independence. Moreover, in the era of paradox of plenty when information became uncontrolled, Indonesia government shall be ready to face several controversy.

Keywords: *million friends zero enemy, foreign policy, identity interdependence, and paradox of plenty.*

Semboyan *million friend zero enemy* (sejuta kawan, nol musuh) tidak jarang mengalami benturan dengan serangkaian kontroversi. Ketika pemerintah sedang mendeklarasikan persahabatan tanpa tebang pilih, namun hingga kini masih ragu mengakui Israel sebagai sahabatnya. Selanjutnya, ketika simbolisasi Islam moderat tengah dipromosikan, pemerintah justru menunjukkan kebangganya terhadap demokrasi. Idiom “Islam yang demokratis” yang berulang kali sidampaikan melalui diplomasi Indonesia mengisyaratkan bahwa Islam haruslah sesuai dengan demokrasi, dan bukan sebaliknya, demokrasi yang harus sesuai dengan Islam. Tidak hanya itu, kontroversi senantiasa bereproduksi ketika hingga kini pemerintah dianggap masih kurang tegas dalam menyelesaikan serangkaian kasus kedaulatan dan TKI.

Tidak hanya kontroversi, hadirnya semboyan *million friends zero enemy* juga memunculkan sebuah anomali. Semboyan *million friends zero enemy* lahir dalam momentum disaat begitu besarnya tuntutan publik yang mengharapakan pemerintah lebih asertif. Sekalipun arti slogan tersebut dipertanyakan, namun dalam realitanya *million friends zero enemy* tersebut masih saja senantiasa disosialisasikan. Padahal potensi untuk melakukan kebijakan asertif terbuka setelah presiden SBY terpilih kembali untuk periode keduanya dengan suara signifikan. Seharusnya serangkaian kontroversi yang dialami pada periode pertama menjadi pelajaran bagi presiden SBY untuk meningkatkan kualitas diplomasi supaya lebih asertif.

Dilatarbelakangi oleh segala kontroversi dan anomali tersebut, tulisan ini hendak mengurai lebih dalam implementasi sekaligus implikasi dari semboyan *million friends zero enemy*. Kelahiran semboyan yang tidak biasa, tentu berkonsekuensi pada adanya problem yang mengiringinya. Lebih lanjut, tulisan ini berupaya mengukur prospek *million friends zero enemy* dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks dalam era *paradox of plenty*. Oleh karena itu, sistematika tulisan ini akan dibagi kedalam lima pembahasan, diawali oleh pendahuluan yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

***Million Friends Zero Enemy* dan Tantangan Masa Kini**

Million friends zero enemy merupakan sebuah semboyan yang hadir menghiasi kebijakan luar negeri Indonesia era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebuah semboyan yang dimaksudkan untuk menampilkkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru (*all direction foreign Policy*) dalam dunia yang sedang bergejolak sebagaimana dilukiskan presiden SBY lewat kiasan “*navigating a turbulent ocean*” (mengarungi samudera bergejolak). Dapat dintisarikan, bahwa pemerintah meyakini era

Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy

sekarang mendorong perlunya sikap kerjasama tanpa menunjukkan keberpihakan. Dengan kata lain, semboyan *million friends zero enemy* yang dilandasi atas prinsip tanpa musuh penting untuk menjadi penekanan netralitas sikap Indonesia ditengah pusaran gejolak polaritas yang semakin kompleks.

Indonesia era presiden SBY hendak mengimajinasikan suatu dunia yang memungkinkan kerjasama antara negara-negara Utara dan Selatan. Sebagaimana diungkapkan Dino Patti Djalal (2009, 107): "Filosofi kerja sama antarnegara presiden SBY ke Utara ke Selatan itu oke. Siapa pun yang pro-Indonesia, kita akan mengulurkan tangan." Dalam diskursus *war on terror* kontemporer, *million friends zero enemy* seolah ingin menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan kolaborasi diantara dua nilai yang secara teoritis maupun praksis acapkali menjadi oposisi biner, yakni nilai Islam dan demokrasi. Berikut ini merupakan contoh pernyataan Presiden SBY mengenai Islam demokratis sebagai berikut: "Indonesia akan menjadi model bahwa tidak perlu ada konflik antara Islam dengan modernitas dan demokrasi. Kami harus mempertahankan Islam kami yang moderat" (Yudhoyono 2009).

Berangsur-angsur Indonesia mengalami transisi citra ke arah yang positif. Reputasi positif diperlukan guna mengklarifikasi adanya mispersepsi publik Internasional kepada Indonesia yang semula diasosiasikan sebagai surga koruptor, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan sarang teroris. Dalam derajat tertentu, citra positif tersebut turut berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai pemegang amanah tuan rumah berbagai forum Internasional, sekaligus menjadikan Presiden SBY sebagai presiden yang sepanjang sejarahnya paling sering menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah forum Internasional. Posisi Indonesia dalam konstelasi global menjadi semakin krusial dengan terlibatnya Indonesia dalam G-20. Sedangkan dalam kancah regional Asia Tenggara, Indonesia didaulat menjadi ketua ASEAN tahun 2011. Bahkan Presiden SBY secara pribadi sempat menjadi salah satu kandidat peraih nobel perdamaian, serta yang terbaru diwacanakan sebagai kandidat Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sempat terjadi perbedaan redaksional dalam sosialisasi semboyan *zero enemy*. Presiden SBY acapkali menggunakan slogan berjudul *million friends zero enemy*. Sedangkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan para diplomat acapkali menggunakan slogan *one thousand friends zero enemy*. Namun, menyimak pernyataan terbaru dari Presiden SBY sebagai berikut, maka semboyan yang paling relevan bagi Indonesia saat ini adalah *million friend*, dan bukan *one thousand friend*:

Saya punya prinsip dan falsafah, dan ini mengalir dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang dirumuskan oleh para pendiri republik, para *founding fathers*, maka yang cerdas dan bijak dalam dunia

yang hidup dalam tatanan globalisasi ini adalah *zero enemy million friends*, satu musuh pun terlalu banyak, seribu kawan kurang (www.deplu.go.id 2010).

Memahami alasan pemilihan redaksional *million friend* agaknya cukup sulit dimaknai secara nalar. Jika diperhatikan, jumlah total negara di dunia tentu jauh dari angka satu juta. Namun alasan pemerintah memilih ungkapan satu juta sahabat karena dilandasi oleh kesadaran jika sahabat Indonesia bukan hanya negara. Hubungan Interasional saat ini bukan lagi hubungan antar negara, melainkan juga diplomasi antar individu (*people to people*). Dengan kata lain, tantangan yang harus dihadapi Indonesia masa kini semakin kompleks, layaknya mengarungi samudera bergejolak. Dalam istilah yang berbeda, menlu Marty Natalegawa mendeskripsikan samudera bergejolak dengan ungkapan keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*), dimana kondisi multipolaritas yang senantiasa dinamis tanpa adanya kekuatan dominan tunggal. Sebuah kondisi yang memungkinkan berbagai negara berinteraksi secara saling menguntungkan (Tan 2007, 150). Melalui semboyan *million friends zero enemy*, Indonesia berusaha untuk tidak terjebak dalam dikotomi antarpolaritas.

Menyongsong Era *Paradox of Plenty*: Dari Polarisasi Menuju Anarki

Ilmu Hubungan Internasional mempelajari sesuatu yang tidak teratur. Sebuah obyek kajian yang dapat berubah tanpa pola-pola yang tetap, tidak seperti halnya deret ukur. Oleh karena itu, kaum tradisionalis meyakini bahwa aktor memiliki sisi rasionalitasnya secara subyektif, sehingga perilaku aktor tidak bisa diprediksi. Sebuah keyakinan yang kemudian digugat oleh kaum positivis yang mencoba menggali adanya kosmologi dibalik ketidakteraturan (Onuf 2002). Di balik dunia yang tidak teratur, ternyata terdapat polarisasi dan subsistem yang dapat difahami secara obyektif. Namun pasca usainya perang dingin, polarisasi tersebut mulai terurai kembali. Kini, kita kembali menghuni dunia yang tidak pasti sebagaimana yang dikisahkan Presiden SBY sebagai “samudera bergejolak”.

Di tengah hiruk pukuk perdebatan ontologi, suka tidak suka, dunia masa kini kembali lagi kepada premis aksiomatik dalam Ilmu hubungan Internasional yakni, “anarki”. Sekalipun secara linguistik terdengar hiperbola, namun anarki merupakan terminologi yang paling moderat dalam mengilustrasikan dunia yang tak terkendali. Di sisi lain, kaum konstruktivis mencoba untuk membongkar sisi *taken for granted* dari konsepsi anarki. Alexander Wendt (1994, 385) memandang anarki bukanlah sesuatu yang *given* melainkan dikonstitusi. Ungkapan

Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy

“*anarchy is what state make of it*” mencoba mengilustrasikan bahwa bukan anarki yang melegitimasi egosentrisme negara, melainkan ego negaralah yang menciptakan struktur anarki (Wendt 1994). Terlepas dari perdebatan mengenai siapa *agency* di dalam konstruksi anarki, apakah negara atau sistem, anarki masihlah menjadi misteri sampai detik ini.

Bahkan misteri tentang anarki semakin menghantui dalam era *paradox of plenty* (Nye 2004, 106). *Paradox of plenty* merupakan sebuah kondisi dimana melimpahnya informasi masa kini justru rentan menimbulkan kontroversi. Sebagaimana dikatakan Manuel Castell (1987), era revolusi industri telah berakhir, dan digantikan oleh revolusi informasi. *Paradox of plenty* lahir dari sebuah paradoks perkembangan teknologi informasi yang tak terkendali. Sebuah situasi yang mengisyaratkan begitu banyak ancaman terhadap reputasi. Dalam konteks Indonesia, era *paradox of plenty* tidak bisa dipisahkan dari kondisi liberalisasi informasi, yakni ketika informasi menjadi komoditas.

Namun, *paradox of plenty* tidaklah selalu muncul secara langsung sebagai konsekuensi atas perkembangan informasi. China justru menunjukkan sebaliknya. Sekalipun sektor informasi semakin maju, namun informasi masih berada dalam kontrol negara. Dengan kata lain, *paradox of plenty* hadir seiring dengan transformasi tatanan informasi sebagai konsekuensi ketika negara tidak lagi memiliki kontrol atas informasi. Implikasinya pencitraan menjadi penting dalam mempertahankan reputasi. Pencitraan tidak hanya dilakukan secara *top down*, namun juga *bottom up*. Sebuah mekanisme yang memiliki kesamaan dengan iklan dalam marketing politik. Asumsi mengenai perlunya pencitraan dalam menjaga reputasi di era *paradox of plenty* dikemukakan oleh Joseph Nye (2004) sebagaimana kutipannya berikut: “Reputation has always mattered in world politics. But the role of credibility becomes an even more important power resource because of the “paradox of plenty” (Nye 2004, 106).

Million friends zero enemy diimplementasikan sebagai sebuah propaganda untuk menjaga reputasi dalam arus *paradox of plenty*. Selain itu, juga merupakan bentuk klarifikasi atas kontroversi yang hilir mudik berganti topik setiap hari. Atau dalam istilah yang sering kita dengar, *million friend zero enemy* adalah semacam pencitraan. Dalam *paradox of plenty*, sebuah sikap berpihak berpotensi membahayakan reputasi pemerintah. Sehingga pemerintah membutuhkan iklan sebagai sebuah simulasi bahwa pemerintah bersikap netral. Namun dalam era *paradox of plenty*, pilihan pemerintah untuk melakukan pencitraan bukan berarti tanpa resiko. Gerak sentripetal dan gerak sentrifugal terjadi secara bersamaan dalam konstelasi diskursus di Indonesia.

Tidak heran jika muncul kontradiksi, ketika pemerintah disatu sisi hendak mengemas suatu generalisasi citra didepan publik, namun di sisi lain informasi tidak lagi berada dalam kuasa negara. Inilah mengapa kontroversi publik yang mengkritik diplomasi presiden SBY tidak pernah berhenti sekalipun pemerintah rutin mempromosikan sikap moderat. Bahkan koalisi kepartaian yang besar secara kuantitas bukanlah benteng yang ampuh untuk menghindar dari kontroversi. Kontroversi akan senantiasa bereproduksi dikarenakan kontroversi telah menjadi komoditi dalam era *paradox of plenty*. Dengan demikian, maka era *paradox of plenty* yang tengah terjadi menjadikan pemerintah Indonesia bukan lagi sebagai subyek, melainkan obyek dalam arus informasi. Bahkan secara teoritik, kondisi *paradox of plenty* dalam derajat tertentu mempengaruhi tataran input kebijakan luar negeri. Balam beberapa kali pernyataan di pers, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa seringkali mengutip Joseph Nye (2004, 107) tentang *paradox of plenty*. Berikut merupakan salah satu kutipan Marty tentang bahayanya era *paradox of plenty*

Diplomat di era kontemporer seperti saat ini haruslah melek informasi. Tantangan yang dihadapi oleh diplomat bukan lagi keterbatasan Informasi, melainkan '*paradox of plenty*'. Untuk itu, diplomat diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan mendiseminasikannya secara baik dan tepat kepada seluruh pihak terkait (www.kemlu.go.id 2012)

Pernyataan tersebut sejatinya menunjukkan jika Marty mempercayai Indonesia sedang berada dalam konteks zaman yang inheren dengan apa yang disebut Nye sebagai *paradox of plenty*. Sebuah zaman yang dikelilingi dengan serangkaian kontroversi. Yang mana bukan hanya kontroversi yang asli, tapi juga yang simulasi. Jean Baudrillard (2005, 101) dengan konsep hiperrealitas mencoba mengeksplanasikan bagaimana publik kini tidak lagi bisa membedakan antara yang asli atau simulasi. Bahkan, ketika yang simulasi ternyata jauh lebih nyata ketimbang kenyataan yang asli. Paradoks teknologi virtual yang hadir dalam kehidupan manusia menyebabkan informasi yang mengontrol manusia, dan bukan manusia yang mengontrol informasi. Dengan kata lain, era *paradox of plenty* menyebabkan arus "samudera bergejolak" menjadi semakin bergejolak sampai tidak terkendali.

All Direction Foreign Policy: Ambivalensi Jatidiri di Tengah Turbulensi

Salah satu manifestasi dari *million friends zero enemy* adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai entitas di segala penjuru (*all direction foreign policy*). Pada tahun 2010 Indonesia telah meresmikan pembukaan hubungan diplomatik baru dengan 21 negara

anggota PBB. Selanjutnya pada tahun 2011, Menteri Luar Negeri meresmikan pembukaan hubungan diplomatik dengan delapan negara di sela Sidang Majelis Umum PBB, diantaranya Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, serta Antigua dan Barbuda (Noviansyah 2011). Yang terbaru pada tahun 2012, beberapa negara telah merencanakan untuk membuka perwakilan di Jakarta antara lain Georgia, Oman, dan juga Vanuatu.

All direction foreign policy telah berhasil memecahkan rekor kerjasama dalam waktu yang tidak lama. Namun dalam implementasinya, ternyata belum sepenuhnya jelas apa manfaat konkrit dari di balik sebuah kerjasama. Dalam hubungan internasional, teman atau musuh merupakan sebuah istilah yang problematik ibarat dua sisi mata uang (Wendt 1994). Dalam dunia yang dihuni dengan kompleksitas polarisasi, maka berteman dengan suatu entitas secara tidak langsung merupakan musuh bagi entitas yang lainnya. Bahkan hubungan pertemanan tidaklah permanen karena negara atau aktor internasional bukanlah sebuah institusi yang statis. Setiap perubahan, baik dalam skala mikro (kepemimpinan, ideosinkretik dan politik domestik) maupun skala makro (struktur internasional) dapat merubah persepsi aktor terhadap aktor lainnya. Dengan demikian, maka banyak sekali variabel yang berpotensi mendeterminasi adanya perubahan status teman menjadi musuh, atau sebaliknya.

Dengan kata lain, Indonesia era presiden SBY sesungguhnya sedang terjebak dalam sebuah ilusi untuk menjadi sosok netral, padahal dunia ini ternyata tidaklah netral. Dalam ungkapan Jacques Derrida (2008), idiom “teman” atau “musuh” pada hakikatnya adalah kata-kata bersayap. Mengakui entitas lain sebagai teman berarti secara tidak langsung telah menunjukkan adanya keberpihakan. Sehingga sikap yang paling netral justru adalah dengan tidak menggunakan idiom teman atau musuh dalam berdiplomasi. Implikasinya, kompetisi dan koooperasi tak ayal hanyalah sebuah dikotomi. Dilema akhirnya terjadi, bagaimana hingga kini pemerintah tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tanpa pernah juga menganggap Israel sebagai musuh. Tidak hanya itu saja, ungkapan Islam yang demokratis yang ditawarkan pemerintah nyatanya tidaklah luput dari pretensi keberpihakan. Demokrasi dalam alam pikir kaum poskolonial, merupakan salah satu proyek *rennaissance* yang euro-sentris. Ditelusuri lebih dalam, pemakaian idiom demokrasi tersebut secara tidak langsung meminggirkan perspektif keislaman tertentu. Kaum Islam radikal tentu berkeberatan sehingga mencoba memutar logika Islam yang demokratis tersebut dengan antitesanya, “demokrasi yang Islamis”. Tanpa disadari, sebuah sikap alergi terhadap radikalisme merupakan salah satu wujud diskriminasi mengatasnamakan moderatisme sekaligus paradoks yang dimunculkan dari *million friends zero enemy*.

Dengan demikian, *million friend zero enemy* ternyata tidaklah benar-benar *zero enemy*. Ketika dibongkar secara genealogis, maka kaum Islam radikal menjadi pihak yang dimarginalkan dalam proses molekuler antara ide demokrasi barat dan Islam moderat. Padahal dalam sejarah Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara dimana polaritas antar ekstrimitas pernah berjuang bersama (Latif 2011). Sulit untuk menolak kenyataan bahwa salah satu ideologi radikal yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia adalah Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Sarikat Islam. Bahkan Pancasila lahir sebagai konsekuensi dari konstelasi antar ideologi radikal dalam zaman pergerakan nasional. Pancasila hendak menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah bentuk negara sekuler *an sich* sebagaimana proyek *renaissance*.

Radikal dalam diskursus di Indonesia kontemporer acapkali dipersempit maknanya dengan senantiasa diidentikkan dengan kekerasan. Padahal, radikal secara etimologi berarti “akar”. Akar menjadi analogi bahwa perlu sebuah sikap kembali pada sesuatu yang dasar. Dengan kata lain, radikal berupaya untuk tidak beradaptasi dalam keumuman yang ada. Apalagi ketika didalam keumuman tersebut semakin melupakan akarnya, semisal demokrasi dan modernitas. Dalam era kontemporer, perkembangan radikalisme menjadi semakin meningkat karena narasi peradaban barat sedang mengalami gerak sentrifugal. Max Hoxheimer dan Theodore Adorno (2007, 8-12) dalam “*dialectic of enlightment*” merumuskan bahwa proyek pencerahan barat bergerak secara dialektis, sedang mengalami kemajuan, sekaligus sedang memulai fase kemunduranya.

Melalui ulasan ringkas sejarah tersebut, maka perlu bagi kita untuk menanyakan kembali, apakah ada yang disebut dengan netral dan moderat? Barangkali pertanyaan tersebut terdengar tidak pantas dipertanyakan di tengah gegap gempitanya semangat pluralisme di Indonesia. Bahkan status sebagai negara muslim demokrasi terbesar di dunia telah dikibarkan dimana-mana. Belum lagi dalam konferensi internasional, Presiden SBY tanpa mengenal lelah menyebut kata Islam moderat berulang kali seolah sebagai mantra yang dapat menyelamatkan Indonesia dari “samudera bergejolak”.

Independensi dalam Arus Interdependensi

Dalam Studi Hubungan Internasional, trayektori mengenai kebijakan *million friends zero enemy* dapat dilacak dalam *great debate*. Tepatnya ketika mahzab *neoliberal interdependence* mengkritik kaum realisme dengan asumsi bahwa sikap *self action* tidak relevan lagi. Joseph Nye menekankan bahwa dunia sedang memasuki fase turbulensi dari polaritas ketika dominasi sedang terurai. Oleh karena itu, sikap

Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy

kerjasama perlu untuk disebar ke segala penjuru karena anatomi struktur internasional semakin terdesentralisasi. Dalam struktur internasional yang sedang mengalami gerak sentrifugal, maka negara akan senantiasa tergantung satu sama lainnya dan tidak akan bisa berdikari. Bahkan, negara yang tertutup seperti China sekalipun, pada era Deng Xiao Ping mulai membuka diri (Harvey 2005, 12).

Dengan demikian, maka *navigating a turbulent ocean* menjadi *idea of polarity* pemerintah Indonesia yang mengangankan dunia hari ini semakin *interdependence*. Pemerintah berpijak pada sebuah kepercayaan bahwa anarki bukanlah harus disikapi dengan mandiri, namun dengan saling terikat satu dengan lainnya dan menjunjung tinggi forum multipolar. Namun tanpa disadari aroma ortodoksi begitu kental dibalik kepercayaan yang moderat tersebut. Tak ayal, logika *interdependence* seolah menjadi pembenaran bagi diplomasi yang tidak asertif. Tidak hanya itu, sikap *interdependence* berpotensi menghambat terkonsolidasinya buku putih sebagai visi kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan mistisisme, bahwa kebijakan luar negeri akan senantiasa terombang ambing dalam samudera bergejolak.

Karena itu, sebuah indikasi adanya paradigma neoliberal dalam kebijakan luar negeri Indonesia ternyata dapat ditelusuri melalui perenungan Presiden SBY yang tersirat dibalik ungkapan “*navigating a turbulent ocean*”. Sebuah perenungan yang inheren dengan analisa Joseph Nye (2004) ketika memandang samudera bergejolak menjadi semakin bergejolak dalam *paradox of plenty*. Sehingga memunculkan keyakinan jika kerjasama tiada lagi bisa dihindari dalam dunia yang berjejaring layaknya *web*. Implikasinya, kebijakan luar negeri hanya dipandang sebagai instrumen jangka pendek yang labil. Dalam kondisi seperti ini, sikap *friendly* merupakan sebuah langkah paling rasional. Sebuah kebijakan luar negeri yang independen justru dianggap tidaklah presisi dalam gejolak dunia yang sukar diprediksi.

Namun ketika dimaknai lebih dalam, ternyata di balik *navigating a turbulent ocean* dan *all direction foreign policy* terdapat anomali. Secara logika, berlayar ditengah samudera bergejolak adalah aktivitas yang berbahaya. Seharusnya, pemerintah sebagai nakhoda perlu segera menentukan kemana arah berlabuh sebelum hempasan ombak samudera bergejolak menenggelamkan segalanya. Namun sayangnya, pemerintah justru mengarahkan kapalnya ke segala arah tanpa jelas mau kemana. Sehingga ditengah kuantitas sahabat yang banyak tersebut, nyatanya tidak berimplikasi pada sebuah kualitas kerjasama yang nyata. Sungguh sebuah ironi, *million friends zero enemy* tidaklah lebih hanya sebuah ajang mencari nama.

Terlepas dari beberapa kritik atas urgensinya, *million friends zero enemy* dapat berfungsi sebagai sebuah pencitraan untuk menjaga reputasi. Ketika kebijakan luar negeri merupakan bagian dari proyek pencitraan, maka wajar jika sebuah kebijakan yang tendensius justru rentan kontroversi. Asumsi mengenai perlunya pencitraan dalam berdiplomasi adalah karena fondasi utama kekuasaan presiden SBY terletak pada reputasi. Sepakat tidak sepakat, popularitas Partai Demokrat lebih didasarkan pada popularitas personal presiden, dan bukan karena populisnya ideologi kepartaian. Implikasinya, basis massa yang menjadi fondasi kekuasaan presiden SBY adalah massa yang labil (*floating*) karena kesetiaannya bukan disandarkan pada ideologi atau tradisi, tetapi oleh reputasi. Oleh karena itu, ketika terjadi kontroversi yang mengancam reputasi pemerintah dalam era *paradox of plenty*, maka penurunan popularitas akan jauh lebih drastis, ketimbang figur pemimpin yang berpijak pada basis ideologis.

Sebuah anomali yang memprihatinkan ketika kita membandingkan dengan negara lainya. Sikap *friendly* Indonesia memiliki nuansa yang berbeda dengan kecenderungan negara lainya. China bersikap *friendly* sebatas hanya kebijakan ekonomi saja, dimana China membutuhkan banyak investasi yang diperuntukkan bagi keberlangsungan perindustrian China. Namun dalam konteks politis, China masih tetap konsisten atas sikap konfrontatifnya terhadap Tibet dan Taiwan. Bahkan Ronald Reagan sebagai seorang pragmatis dengan doktrin *reaganomics*-nya nyatanya juga tidak mengubah kebijakan luar negeri AS untuk lebih *friendly* terhadap Timur Tengah. Dengan kata lain, sikap bersahabat AS dan China hanyalah didasari atas pragmatisme ekonomi, dan tetap tidak merubah siapa musuh mereka secara politis. Sedangkan *million friends zero enemy* berusaha untuk mengaburkan masalah politis dan ekonomis. Di balik pragmatisme pemikiranya, neoliberal masih berani jujur mengatakan bahwa yang netral ternyata tidaklah ada. Namun sebaliknya, pemerintah Indonesia masih bersikeras menjunjung tinggi mitos akan adanya netralitas.

Mengarungi Samudera Bergejolak atau Mendayung di Antara Dua Karang?

Sebuah teks lahir dari sebuah konteks. Sehingga teks perlu untuk senantiasa bertransformasi secara ekletik guna beradaptasi dalam konteks zaman yang dinamis. Dengan kata lain, teks tidaklah bersifat dogmatis dan akan senantiasa mengalami proses kontekstualisasi. Namun problem menjadi muncul ketika dalam melakukan kontekstualisasi justru melupakan teks itu sendiri. Dengan demikian, maka perdebatan antara teks dan konteks merupakan perdebatan klasik yang tak pernah luput dari kontroversi.

Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy

Dilema antara teks dan konteks tersebut kembali terjadi di zaman Presiden SBY. Presiden SBY berpijak pada asumsi bahwa dunia kini tidak lagi terfragmentasi menjadi dua kubu sebagaimana konteks perang dingin. Oleh karena itu, perlu revitalisasi terhadap filosofi “mendayung di antara dua karang” sebagaimana yang Bung Hatta kemukakan. Presiden SBY hendak melakukan kontekstualisasi atas teks mendayung di antara dua karang dengan teks “*navigating a turbulent ocean*”:

Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan politik luar negeri sebagai “mendayung di antara dua karang”, dalam arti antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat “mengarungi samudera yang penuh gelombang” (Yudhoyono 2012).

Dari kutipan diatas menunjukkan kebaruan gagasan yang ditawarkan oleh Presiden SBY. Kiasan “mengarungi samudera bergejolak” dalam derajat tertentu memodifikasi filosofi “mendayung di antara dua karang”. Presiden SBY berujar jika era Perang Dingin dimana dua karang, yaitu Blok Barat dan Timur, telah berubah. Tantangan kekinian lebih pada ambivalensi polaritas dimana dunia menjadi kompleks dan penuh gelombang. Inilah yang menjadi dalil ontologi pemerintah untuk mengedepankan *million friends zero enemy* yang lahir sebagai sebuah upaya menjaga netralitas Indonesia ditengah turbulensi. Namun ironinya, *million friends zero enemy* justru semakin menjadi beban bagi Indonesia untuk bersikap asertif. Sebagai contoh sikap pemerintah Indonesia yang ragu untuk memberi peringatan tegas pada Malaysia dan Arab Saudi yang sering terlibat dalam kasus TKI. Klimaksnya, ketika pemerintah Indonesia harus mengeluarkan 2 miliar Rupiah untuk membebaskan seorang TKI bernama Darsem, serta kegagalan mengantisipasi pemancung Ruyati yang tidak lain merupakan korban jiwa TKI ketiga dalam periode pemerintahan Presiden SBY. Masalah kedaulatan juga dipertanyakan, masih segar di ingatan bagaimana insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal Agustus 2010. Sebuah kontroversi yang hanya menghasilkan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) di Kinabalu September 2010.

Karena itu, maka konteks kekinian yang sedang dialami Indonesia justru mengisyaratkan supaya Indonesia kembali kepada teks. Sebuah teks diperlukan untuk memberi pedoman arah dan tujuan dalam dunia yang labil ini, agar Indonesia tetap stabil. Tanpa adanya teks, maka Indonesia akan selalu harus menyesuaikan dengan konteks, hingga pada akhirnya mencerabut teks dari akarnya. Filosofi tekstual dari kaum radikal tersebut ternyata inheren dengan tantangan masa kini, ketika konteks internasional semakin anarki.

Dengan demikian, maka filosofi Bung Hatta “mendayung di antara dua karang” masihlah relevan sebagai teks yang menjawab tantangan masa kini. “Mendayung di antara dua karang” mengimajinasikan Indonesia sebagai negara yang merdeka seutuhnya, tanpa harus mengabdikan dalam polaritas tertentu. Indonesia adalah Indonesia yang memiliki tujuannya secara bebas, tanpa harus mengganggu kebebasan entitas lainnya. Sebuah semangat berdaulat yang tidak ditemukan dalam filosofi “mengarungi samudera bergejolak” yang justru membuat kedaulatan Indonesia semakin bergejolak. Dengan kata lain, mengarungi samudera yang penuh gejolak dengan mengibarkan bendera *million friends zero enemy* merupakan blunder. Mencerminkan sebuah sikap ketergantungan akan kerjasama dan menihilkan arti kemandirian dalam dunia *paradox of plenty* yang anarki. Padahal, *paradox of plenty* dengan kebebasan informasinya sejatinya membuka ruang dialog antara pemerintah dan publik untuk mulai mengkonsolidasikan sebuah teks diplomasi yang berjatidiri. Namun sayangnya, kesempatan berupa kebebasan informasi tersebut tidak dimanfaatkan pemerintah untuk berdialog, melainkan bermonolog melalui pencitraan. Sebuah semboyan yang tak lain merupakan refleksi sepihak pemerintah hanya demi mendapat reputasi

Elemen krusial yang dibutuhkan demi terselesaikannya teks panduan diplomasi Indonesia adalah bagaimana pemerintah secara intensif menggali opini publik secara *bottom up* sebagai input kebijakan luar negeri. Supaya terjadi sinergi antar kebijakan dan kehendak publik, maka ruang publik diperlukan sebagai arena pertarungan gagasan. Ruang publik yang netral dan di dalamnya terjadi komunikasi yang egaliter dan dua arah antara pemerintah dan publik (Habermas 2000). Ruang publik yang telah dibuka oleh *paradox of plenty* sejatinya dapat merupakan instrumen sekaligus sebuah prakondisi terbentuknya segregasi ide untuk menentukan kemana arah diplomasi Indonesia. Bahkan ruang publik dapat sekaligus memprakondisikan terwujudnya persatuan dan identitas nasional. Kembali pada Bung Hatta, tanpa komunikasi yang egaliter, maka persatuan sesungguhnya hanyalah persatean.

Kesimpulan

Tanpa disadari problem dalam *million friends zero enemy* mengingatkan kembali pada problem mengenai jatidiri Indonesia. Ketika pemerintah hendak mencitrakan sosok Indonesia sebagai sahabat bagi semua negara, maka sesungguhnya menunjukkan bahwasanya pemerintah belum mampu merumuskan siapa Indonesia. Mengutip renungan Yudi Latif (2011), bahwa Indonesia adalah negara paripurna. Sebuah negara yang belumlah selesai dalam mengidentifikasi siapa dirinya. Zaman pergerakan nasional tidaklah selesai tahun 1945.

Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy

Sehingga inilah pekerjaan rumah bagi penerus bangsa yang dengan dialog terus menerus melakukan identifikasi atas jatidirinya.

“Mengarungi samudera bergejolak” sejatinya merupakan sikap menyadari bahwasanya semua aktor internasional kini sedang bertarung dan berkompetisi. Sehingga status musuh dan teman dapat berubah-ubah dengan cepat dalam dunia yang semakin tidak terkendali. Sebuah anarki seharusnya disikapi dengan independensi. Bukan berarti dunia yang semakin interdependensi membuat Indonesia semakin terperangkap dalam ambivalensi. Penulis berpandangan bahwa ide radikal sesungguhnya menjadi perlu dimiliki dalam era *paradox of plenty*. Sebuah sikap berani untuk kembali pada yang hakiki, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi jati diri.

Akan tetapi, *million friends zero enemy* hendak memungkirkan bahwa dunia masih dan justru semakin anarki. Maka dari itulah, spirit Bung Hatta supaya Indonesia mampu menjadi negara yang mampu dengan leluasa mendayung diantara dua karang sejatinya masih relevan. Bung Hatta memproyeksikan supaya Indonesia menjadi negara yang tidak mudah terombang ambing, dan memiliki arah yang jelas dalam mengarungi samudera internasional. Bukan ombak yang menentukan arah Indonesia, namun sebaliknya, Indonesia yang menentukan arah ombak. Dengan demikian, Indonesia perlu segera kembali menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Merdeka dengan menjadi subyek yang secara otonom mampu mengidentifikasi siapa dirinya, dimana tujuannya, tanpa menghiraukan kemana ombak membawanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Baudrillard, Jean, 2005. *Simulacra and Simulation*. Cambridge: Polity Press.
- Castells, Manuel, 1987. *Network Society*. New York: Palgrave Macmilian.
- Chakrabarty, Dipesh, 2000. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Derrida, Jacques, 2008. *The Animal That Therefore I Am*. New York: Fordham University Press.
- Djalal, D. Patti, 2009. *Harus Bisa : Seni Kepemimpinan ala SBY*. Jakarta: R&W.
- Habermas, Juergen, 2000. *Theory of Communicative Action*. London: Sage.

- Harvey, David, 2005. *The Brief History of Neoliberalism*. Oxford, Blackwell.
- Hoxheimer, Max, dan Theodore Adorno, 2007. *Dialectic of Enlightenment*. Stanford University Press.
- Latif, Yudi, 2011. *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Levi, C. Strauss, 1982. *The Way of the Masks*. Seattle: University of Washington Press.
- Nye, Joseph, 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Diplomacy in the 21st century*. New York: Public Affairs
- Yudhoyono, S. Bambang, 2009. *Indonesia Unggul: Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan oleh Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal

- Onuf, Nicholas, 2002. "Institution, Intention, and International Relation, *Review of International Studies*", Maret, **28** (1): 211-22.
- Tan, P. Johnson, 2007. "Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia Wolrdview and Foreign Policy". *ASEAN Perspective*, **31** (3): 147-181.
- Wendt, Alexander, 1994. "Collective Identity Formation and the International State". *American Political Science Review*, **88** (2): 384-396.

Website

- Kementerian Luar Negeri. "Transkripsi Menteri Luar negeri Marty Natalegawa membuka Diklat Internasional ke-9 Sisdilu dan Sesarlu di Gedung Pancasila" tanggal 10 April 2012 [online]. dalam http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetailNewsLi ke.aspx?l=id&ItemID=ad15ef98-529d-4923-86ca-b8c2d55d5f94 [diakses 25 April 2012].
- Kementerian Luar Negeri. "Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Pada Acara Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Sydney, Australia" tanggal 10 Maret 2010 [online]. dalam <http://www.deplu.go.id/Lists/SpeechesAnd Transcription/DispForm.aspx?ID=612&l=en> [diakses 2 April 2012].

Tabloid

- Noviansyah, Aditya, 2011. "Indonesia Buka 21 Hubungan Diplomatik 2011". *Tempo*, 12 Januari, hlm 3.
- Yudhoyono, S. Bambang, 2012. "Menjalankan Diplomasi yang Cerdas Cekatan dan Efektif". *Tabloid Diplomasi*, Maret-April, hlm 4.